An-Najah: Journal of Islamic Economics
Volume 2, Nomor 2, Oktober 2026

https://jurnal.almaidah.or.id/index.php/JNIE/en

Analisis Struktur Kelembagaan Perbankan Syariah dalam Mendukung Efektivitas Operasional Bank

Ismayanti Lubis, Adisty Sifa, Hendra

Abstrak
Penelitian ini bertujuan menganalisis secara kualitatif peran dan konfigurasi desain struktur kelembagaan perbankan syariah dalam mendukung pencapaian efektivitas operasional bank di Indonesia. Keunikan sistem bank syariah secara otomatis mengharuskan adanya penerapan tata kelola pengawasan ganda yang mampu mengintegrasikan standar aspek bisnis finansial dan jaminan kepatuhan syariat secara mutlak bersamaan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif berbasis telaah studi literatur komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan struktur kelembagaan yang kokoh proporsional, terutama wujud integrasi fungsi independen Dewan Pengawas Syariah (DPS) ke dalam arsitektur tata kelola direksi perusahaan, sangat krusial berupaya dalam meminimalisir potensi luapan luapan risiko beban pemborosan operasional dan menekan gesekan masalah keagenan. Kesimpulannya, desain hierarki tata struktur kelembagaan perbankan syariah yang senantiasa tangkas lincah proporsional merata merupakan pilar fundamental utama yang menjamin optimalisasi efisiensi biaya, kepatuhan moral hukum perundangan Islam, dan jaminan keunggulan superioritas kelanggengan daya saing operasional harian kelancaran entitas bank masa kini.

Kata Kunci: Perbankan Syariah, Struktur Kelembagaan, Tata Kelola Perusahaan, Efektivitas Operasional, Dewan Pengawas Syariah.

Abstract
This study aims to qualitatively analyze the role and configuration design of the institutional structure of Islamic banking in supporting the achievement of bank operational effectiveness in Indonesia. The uniqueness of the Islamic banking system automatically requires the implementation of dual supervisory governance capable of simultaneously integrating standard financial business aspects and absolute sharia compliance guarantees. The research approach used is a descriptive qualitative method based on a comprehensive literature study review. The study results show that the existence of a robust and proportional institutional structure, especially the integration of the independent function of the Sharia Supervisory Board (SSB) into the corporate governance architecture of the board of directors, is highly crucial in minimizing the potential overflow of operational waste burden risks and suppressing agency problem frictions. In conclusion, the hierarchy design of the Islamic banking institutional structure which is

always proportionally agile and equitable is the main fundamental pillar that guarantees cost efficiency optimization, compliance with Islamic legal moral legislation, and a guarantee of the superiority excellence of operational competitiveness continuity of today's bank entity operations.

Keywords: *Islamic Banking, Institutional Structure, Corporate Governance, Operational Effectiveness, Sharia Supervisory Board.*

Pendahuluan

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia telah menunjukkan akselerasi pertumbuhan yang sangat signifikan dalam kurun waktu dua dekade terakhir. Transformasi positif ini secara langsung didorong oleh meningkatnya kesadaran religiusitas masyarakat muslim yang menginginkan sistem transaksi keuangan bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir. Sebagai salah satu pilar utama penopang perekonomian nasional, bank syariah dituntut untuk tidak hanya sekadar mengandalkan label agama, tetapi juga harus mampu membuktikan tingkat profesionalisme manajerial. Oleh karena itu, di tengah iklim kompetisi industri keuangan global yang semakin hiperkompetitif, eksistensi sebuah arsitektur tata kelola institusi yang sangat solid dan tangguh menjadi syarat mutlak bagi keberlanjutan.

Karakteristik operasional perbankan syariah memiliki keunikan mendasar yang membedakannya secara ekstrem dari desain arsitektur perbankan konvensional pada umumnya. Institusi keuangan syariah senantiasa mengemban beban tanggung jawab ganda, yaitu kewajiban untuk terus memaksimalkan raupan laba finansial bagi para pemegang saham, dan di saat bersamaan wajib menjamin kepatuhan mutlak terhadap prinsip syariat Islam. Dualisme tanggung jawab operasional ini secara otomatis menuntut rancangan desain struktur kelembagaan yang jauh lebih kompleks dan berlapis. Integrasi elemen-elemen pengawasan syariat ke dalam struktur organisasi direksi dan komisaris menjadi sebuah keharusan prosedural untuk mencegah terjadinya penyimpangan moral atau praktik bisnis yang bertentangan dengan fatwa fikih.

Struktur kelembagaan yang tertata dengan sangat baik dan proporsional merupakan kunci utama penentu tingkat efektivitas dan efisiensi laju roda operasional bank. Pembagian garis wewenang, batasan tugas fungsional, serta mekanisme koordinasi antar divisi harus tergambar secara presisi di dalam bagan struktur organisasi perusahaan. Kejelasan pemisahan tugas antara dewan komisaris selaku pengawas, jajaran direksi selaku eksekutif pengelola, dan dewan pengawas syariah sangat membantu menghindari terjadinya tumpang tindih kepentingan. Apabila arsitektur kelembagaan ini dirancang secara keliru atau dibiarkan usang, maka bank syariah akan

sangat rentan mengalami kelumpuhan birokrasi, pemborosan biaya operasional, serta penurunan tajam pada kualitas pelayanan nasabah harian.

Menghadapi era modernisasi dan disrupsi teknologi saat ini, tantangan operasional yang merintangi laju perbankan syariah nyatanya menjadi semakin kompleks dan sulit diprediksi. Tingginya biaya operasional, fluktuasi likuiditas pasar, dan ancaman risiko kejahatan siber memaksa bank untuk selalu bersikap tanggap dan lincah dalam mengambil manuver kebijakan taktis. Sayangnya, banyak entitas bank syariah yang masih terjebak pada desain struktur kelembagaan hierarkis tradisional yang cenderung kaku dan sangat lambat merespons perubahan tren pasar. Struktur organisasi yang terlalu gemuk justru akan memicu hambatan alur komunikasi internal sehingga pada akhirnya sangat merugikan efektivitas pencapaian target kerja operasional strategis yang telah ditetapkan direksi.

Meskipun kajian mengenai lanskap perbankan syariah telah banyak bertebaran dalam literatur akademik keuangan, sebagian besar penelitian terdahulu terpaku pada analisis kuantitatif kinerja rasio keuangan. Pembahasan mendalam mengenai anatomi desain struktur kelembagaan dan interaksinya terhadap peningkatan efisiensi operasional internal bank masih sangat jarang dieksplorasi secara holistik. Kesenjangan literatur ini menyebabkan minimnya referensi teoretis yang secara spesifik membedah bagaimana sinergi fungsi antar lembaga internal bank syariah mampu menciptakan keunggulan kompetitif. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah kajian analitis kualitatif untuk mengungkap dinamika tarik-ulur kewenangan struktural serta mencari formulasi desain kelembagaan yang paling adaptif bagi bank syariah di era modern.

Berpijak pada latar belakang permasalahan dan celah kekosongan literatur penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, artikel jurnal ini disusun dengan tujuan khusus untuk menganalisis efektivitas struktur kelembagaan perbankan syariah. Melalui penelaahan mendalam terhadap anatomi kelembagaan operasional ini, diharapkan dapat ditemukan gambaran komprehensif mengenai kontribusi positif pembagian wewenang struktural terhadap efisiensi kinerja operasional harian bank. Hasil akhir dari kajian kualitatif deskriptif ini sangat diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis bermakna bagi pengayaan khazanah keilmuan ekonomi Islam. Selain itu, kajian ini juga menyajikan rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan regulator perbankan untuk senantiasa menyempurnakan pedoman tata kelola institusi perbankan syariah nasional.

Kajian Teori

Variabel 1: Struktur Kelembagaan Perbankan Syariah Struktur kelembagaan dalam konteks perbankan syariah merupakan sebuah kerangka sistem hierarki organisasi yang secara resmi mengatur pola pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab tata kelola perusahaan. Secara konseptual, struktur ini dibentuk bukan sekadar untuk memenuhi persyaratan administratif perizinan pendirian dari otoritas pengatur, melainkan berfungsi krusial sebagai cetak biru arah eksekusi strategi bisnis entitas keuangan. Di dalam sebuah kelembagaan bank syariah, kerangka struktur wajib dirancang dengan sangat hati-hati untuk mengakomodasi seluruh rangkaian proses manajemen risiko yang kompleks, pencatatan transaksi yang transparan, dan pemenuhan layanan publik. Struktur yang rapi menjamin tercapainya keseimbangan antara pencarian keuntungan dan etika moral.

Elemen puncak tertinggi dalam struktur kelembagaan bank perseroan terbatas senantiasa dipegang oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang berfungsi melantik jajaran Dewan Komisaris. Dewan Komisaris ini kemudian mengemban tugas pokok sentral sebagai perpanjangan tangan pemilik modal untuk melakukan pengawasan melekat terhadap jalannya kepengurusan perusahaan. Dalam pelaksanaannya, fungsi dewan pengawas umum ini harus senantiasa memastikan bahwa seluruh jajaran direksi pelaksana benar-benar bekerja mematuhi koridor rencana bisnis strategis yang telah disahkan. Dewan Komisaris dilarang keras terlibat langsung dalam eksekusi operasional teknis harian agar fungsi objektivitas pengawasan independen dapat senantiasa terjaga dari benturan konflik kepentingan internal manajemen direksi.

Keistimewaan struktural yang menjadi ciri khas pembeda paling mendasar pada kelembagaan perbankan syariah adalah kehadiran mutlak dari unsur Dewan Pengawas Syariah (DPS). Posisinya dalam bagan struktur organisasi diletakkan sejajar atau berada di bawah garis koordinasi dewan komisaris, namun dengan kewenangan hak veto yang sangat independen menyangkut fatwa hukum agama. DPS bertugas khusus memantau, mengevaluasi, dan menjustifikasi bahwa seluruh kegiatan penghimpunan dana, penyaluran pembiayaan, hingga produk investasi bebas dari unsur riba. Ketiadaan lembaga DPS ini dalam kerangka institusi secara otomatis akan membatalkan status entitas lisensi syariah tersebut secara hukum negara maupun ditinjau secara pandangan syariat murni.

Sementara itu, pada garis komando eksekutif operasional, Dewan Direksi bertindak selaku motor penggerak roda kelembagaan utama yang mengeksekusi strategi perbankan ke dalam ranah teknis. Untuk dapat menunjang beban berat tugas pengarahan operasional ini, struktur direksi senantiasa ditopang oleh keberadaan berbagai komite fungsional spesifik, seperti komite audit internal, komite manajemen risiko pembiayaan, dan

komite remunerasi pegawai. Keberadaan sayap komite khusus ini dibentuk guna memastikan kelancaran alur koordinasi serta membantu direktur utama mengambil keputusan presisi berlandaskan data analitik yang valid. Keselarasan irama kerja kolektif antar unsur organ kelembagaan ini sangat menentukan tingkat keselamatan institusi keuangan dari risiko krisis.

Variabel 2: Efektivitas Operasional Bank Efektivitas operasional bank merupakan parameter indikator kinerja utama yang secara langsung mengukur sejauh mana sebuah institusi keuangan mampu merealisasikan target bisnis perusahaan menggunakan sumber daya minimum. Konsep efektivitas ini sangat merujuk pada perbandingan rasio antara tingkat masukan modal input atau biaya operasional terhadap jumlah luaran hasil keuntungan yang berhasil dicetak secara nyata di akhir periode. Semakin tinggi tingkat efisiensi pengelolaan biaya pengeluaran untuk menunjang aktivitas penghimpunan dana pihak ketiga, maka bank tersebut akan semakin diklasifikasikan sebagai entitas yang sangat efektif beroperasi. Parameter ini menjadi tolok ukur penting bagi pasar modal dalam menilai kemampuan daya saing bank.

Dalam kerangka penilaian industri keuangan secara teknis, efektivitas operasional sebuah entitas perbankan selalu dipantau dengan ketat melalui analisis indikator rasio keuangan operasional terhadap pendapatan. Rasio yang mampu ditekan serendah mungkin mengindikasikan bahwa manajemen jajaran direksi sukses menjalankan program efisiensi pemangkasan biaya rutin yang tidak diperlukan perusahaan. Selain rasio efisiensi beban biaya tersebut, efektivitas pencapaian bank juga sangat dinilai dari persentase kemampuan mengembalikan tingkat keuntungan laba investasi aset bersih. Indikator vital inilah yang secara empiris menjadi landasan utama penilaian otoritas moneter negara dalam merumuskan level kesehatan predikat struktur fundamental permodalan perusahaan perbankan.

Namun demikian, bagi entitas perbankan Islam, rumusan pengukuran efektivitas operasional ini tidak diperbolehkan hanya terbatas bersandar mutlak pada angka manipulasi rasio finansial pembukuan semata. Terdapat pilar dimensi tambahan yang sangat krusial, yakni sejauh mana efektivitas prosedur penapisan transaksi harian bank sukses menerapkan garansi perlindungan kepatuhan hukum syariat mutlak. Pencapaian tingkat perolehan nilai laba bersih yang setinggi apa pun akan segera dinilai sepenuhnya tidak efektif secara sistem apabila hasil audit independen kelak membuktikan adanya keterlibatan perputaran aliran dana haram. Oleh sebab itu, tingkat kecepatan dan kecermatan penyelesaian kendala kepatuhan agama merupakan unsur mutlak penjamin efektivitas operasional syariah.

Faktor pendorong penentu kualitas keberhasilan upaya peningkatan pencapaian efektivitas operasional di lapangan selalu bergantung erat pada kompetensi mutu infrastruktur sumber daya kelembagaan internal. Pemanfaatan kemajuan piranti sistem teknologi otomatisasi digital perbankan dan keandalan rekrutmen pegawai yang menguasai literasi syariat mumpuni akan menekan masif durasi waktu pelayanan antrean nasabah. Eksekusi standardisasi prosedur operasional pekerjaan dengan rancangan hierarki jalur birokrasi komunikasi yang singkat sukses meredam potensi kebingungan staf garda depan melayani keluhan nasabah. Dengan demikian, pengintegrasian antara kecanggihan sistem mesin infrastruktur komputasi teknologi, keterampilan talenta sumber daya manusia, dan kelugasan struktur adalah resep mutlak meraih puncak tingkat efektivitas perbankan.

Metode Penelitian

Penelitian akademis analitis ini sepenuhnya dirancang menggunakan pendekatan metodologi penelitian kualitatif dengan jenis desain metode kepustakaan studi literatur deskriptif eksploratif. Seluruh data utama yang dirujuk seutuhnya merupakan sumber data sekunder yang dikumpulkan secara cermat membedah berbagai dokumen literatur akademik bereputasi, mencakup rujukan belasan jurnal ilmiah keuangan perbankan syariah terakreditasi nasional, telaah buku teks monograf teori kelembagaan, serta berbagai lembar dokumen regulasi resmi dari Otoritas Jasa Keuangan terkait aturan baku cetak biru tata kelola bank. Proses pelaksanaan rangkaian tahapan analisis informasi data kualitatif ini dikerjakan secara sangat sistematis berurutan melintasi alur reduksi seleksi data, interpretasi narasi data, hingga penyimpulan akhir objektif.

Hasil dan Pembahasan

Sub Bab 1: Konfigurasi Struktur Kelembagaan Perbankan Syariah

Desain konfigurasi susunan struktur kelembagaan perbankan syariah yang beroperasi resmi di wilayah Indonesia saat ini secara hukum telah dibakukan mengikuti panduan kerangka regulasi Otoritas Jasa Keuangan dan ketetapan fatwa Dewan Syariah Nasional. Berdasarkan analisis telaah literatur peraturan tersebut, struktur hierarki bank umum syariah secara nyata mewajibkan diterapkannya model sistem pengawasan tata kelola sistem ganda yang sangat ketat. Di dalam sistem ganda perseroan terpadu ini, fungsi eksekutif pengendalian perusahaan yang dimotori oleh dewan direksi secara tegas wajib dipisahkan wewenangnya dari fungsi majelis pengawas umum pimpinan dewan komisaris. Pemisahan ekstrem ini ditujukan menjaga batas keseimbangan kontrol kemudi kuasa manajemen.

Eksistensi figur Dewan Pengawas Syariah (DPS) sukses diintegrasikan ke dalam postur struktur inti perusahaan sebagai unit badan independen yang senantiasa menempati posisi sentral sangat mulia pada bagan tata kelola dewan. Kehadiran kelembagaan badan pengawas agama ini sebetulnya bukan sebatas untuk memenuhi pajangan pajangan ornamen prasyarat legalitas formal belaka, melainkan dirancang fungsional berkolaborasi sinergis memeriksa rancangan cetak biru produk bank baru. Koordinasi harmonis DPS dengan perangkat organ direktur kepatuhan, serta sinkronisasi kerjanya dengan tim satuan audit internal memastikan mekanisme pengawasan berlapis. Melalui jalinan kerangka tata kelola ganda yang terstruktur ini, manajemen bank memiliki alarm peringatan dini pencegahan potensi bahaya penyimpangan operasional harian.

Selain kehadiran komponen majelis syariah, anatomi kelembagaan internal entitas perbankan Islam era mutakhir juga dicirikan dengan lahirnya divisi unit kepatuhan syariah spesifik setingkat eksekutif jajaran tengah manajemen perusahaan harian. Unit departemen kepatuhan yang bertanggung jawab langsung menyampaikan laporannya kepada jajaran kepemimpinan direktur utama ini sehari-hari bertugas meninjau ketertiban eksekusi seluruh standar manual operasional layanan meja perbankan. Mereka harus senantiasa terjun keliling memantau kelengkapan berkas klausul kelayakan dokumen perikatan pembiayaan di semua tingkatan anak cabang pembantu perusahaan. Fungsi inspeksi operasional lini tengah inilah yang efektif memastikan bahwasanya seluruh wejangan fatwa hukum teori ulama benar-benar diamalkan lurus dipraktikkan tanpa cela kekeliruan lapangan.

Meskipun cetak biru penyusunan komposisi fungsi arsitektur kelembagaan di atas kertas tampak sangat sempurna tertata rapi berlapis mengawal kebenaran, praktik realitas interaksi eksekusi antar badan institusi rupanya sering kali tetap memunculkan tantangan hambatan koordinasi birokrasi komunikasi. Tingkat kelemahan paling menonjol sering muncul dari tingginya friksi perebutan tafsir yurisdiksi batas wewenang area kerja tim majelis auditor bagian keuangan umum perusahaan yang saling berbenturan silang pendapat evaluasi dengan tim jajaran kepengurusan bagian pengawas syariah eksternal. Kesalahpahaman teknis penyamaan standar prosedur bahasa operasional ini tak jarang bermuara pada sangat lambatnya proses persetujuan persetujuan peluncuran suatu rilis produk inovasi layanan terbaru menuju pasar.

Menyikapi ancaman kendala kekakuan birokrasi struktur pengawasan ganda yang berpotensi melemahkan kecepatan pergerakan agilitas taktis operasional institusi bank, maka reformasi penataan ulang kelincahan desain bagan arsitektur kelembagaan mutlak dirasa sangat mendesak harus dilakukan jajaran petinggi bank. Susunan hierarki alur pengambilan perintah komando vertikal berlapis tinggi sangat perlu dipangkas lebih datar

agar distribusi penyebaran instruksi mandat resolusi masalah dapat mengalir cepat merata. Integrasi fasilitasi kemudahan aplikasi portal saluran pelaporan sistem jaringan komunikasi antar jajaran elemen pilar struktur perusahaan diyakini amat ampuh secara masif sukses memperbaiki kualitas keterpaduan sistem harmoni organisasi internal. Struktur bank lincah kelak niscaya memandu institusi merengkuh level superioritas.

Sub Bab 2: Dampak Struktur Kelembagaan terhadap Efektivitas Operasional Desain integrasi kekuatan arsitektur pembagian susunan tugas organisasi struktur kelembagaan yang terbangun secara proporsional nyatanya terbukti secara absolut sukses memberikan lonjakan dampak pengaruh signifikan secara langsung pada capaian peningkatan efektivitas indikator operasional perbankan syariah nasional. Kejelasan sekat penentuan wewenang perumusan eksekusi kebijakan kewajiban kerja terbukti menekan tajam hilangnya inefisiensi pengeluaran beban biaya tak terduga sumber operasional akibat masalah tumpang tindih urusan keagenan pegawai intern manajerial. Optimalisasi fungsi unit majelis komite audit pengawasan intern sukses cepat memitigasi mendeteksi celah skandal kerugian moral penyaluran kredit gagal awal. Hal ini otomatis berdampak positif drastis menyelamatkan tekanan arus kas pengeluaran operasional keuangan operasional institusi.

Peranan krusial fungsional independensi organ sentral figur para pakar ulama fikih Dewan Pengawas Syariah pada tatanan bagan struktur kelembagaan juga amat nyata mampu menjadi perisai efektif penjaga kualifikasi kesucian lini bisnis perbankan. Ketatnya saringan pengawasan berlapis lapis di tingkat pucuk manajerial memastikan operasional bank terbebas hukuman jeratan risiko pendapatan penghasilan tak halal haram yang wajib terbuang dialihkan seluruhnya untuk porsi kas donasi sosial kemasyarakatan. Dengan sistem jaminan ketangguhan pengawasan syariah ini, target persentase laju tingkat pertumbuhan persentase margin laba bersih perusahaan benar-benar terjaga murni kualitas efektivitas nominal realisasi targetnya sejalan seirama prinsip ajaran moral hukum teologi keagamaan agama.

Kehebatan rancangan susunan arsitektur badan kelembagaan modern organisasi perbankan Islam kekinian turut memberikan kontribusi krusial penting dalam wujud upaya strategi dukungan akselerasi transformasi digitalisasi infrastruktur pelbagai sistem perangkat lunak operasional aplikasi seluler nasabah. Hadirnya penugasan divisi struktur satuan bidang tugas manajemen transformasi teknologi informasi secara spesifik pada jajaran lapisan struktur eselon manajerial direksi berhasil mempertajam tingkat kefokusan manajemen perusahaan beralih berfokus digitalisasi. Departemen teknologi baru khusus inilah yang secara terukur sanggup sangat efektif mengambil estafet kendali penghematan biaya logistik harian

cabang serta mampu terus menjaga stabilitas kualitas kecepatan pemrosesan respon ketepatan layanan unggulan prima mutakhir keluhan transaksi harian mesin daring nasabah.

Selain berpusat membedah dominasi keunggulan efisiensi pengeluaran penekanan dana permodalan keuangan belaka secara kaku, wujud nyata sumbangsih peranan integrasi struktur tata kelola kelembagaan unggul ini juga terefleksikan sangat sukses pada penciptaan keharmonisan produktivitas sistem siklus ekosistem kerja sumber daya insani pegawai perbankan. Kejelasan alur sistem hierarki struktur karier serta keterbukaan alur transparansi operasional pelaporan pertanggungjawaban jenjang organisasi menumbuhkan kuat komitmen militansi kepuasan batin loyalitas kesetiaan pegawai bakat talenta tinggi syariah untuk tak kunjung pindah institusi. Tingkat semangat retensi motivasi loyalitas karyawan yang tinggi ini ampuh sukses besar menurunkan persentase angka pemborosan dana beban pelatihan orientasi penyesuaian rekrutmen pegawai amatir baru.

Sebagai sebuah sintesis ikhtisar argumen perumusan akhir kesimpulan penutup narasi pada kajian penjabaran ini, dapat dibuktikan meyakinkan bahwa sinergitas mutu integrasi antar ragam unit struktur kelembagaan pengawas merupakan modal resep pamungkas kebangkitan efektivitas kelancaran operasional entitas bank syariah. Kemampuan daya kelincahan sistem hierarki komposisi kelembagaan yang mampu selalu cepat menyesuaikan menyeimbangkan antara tuntutan ambisi raupan dominasi hegemoni target bisnis perolehan pasar komersial dunia dan batas kepatuhan mutlak kaku fatwa syariat merupakan kunci tameng pelindung kelangsungan bisnis abad modern. Apabila struktur sistem perbankan terus disempurnakan lentur ramping proporsional, perbankan syariah tak ayal sanggup menahbiskan keunggulan superior mendominasi pertempuran kancah sistem efektivitas bisnis pasar moneter.

Kesimpulan

Berdasarkan pada seluruh paparan jabaran panjang rentetan hasil telaah kajian analisis evaluasi mendalam yang telah usai dibahas secara terperinci menyeluruh di atas, maka dapat dirangkum satu kesimpulan konkret yang tegas bahwa eksistensi wujud kualitas arsitektur struktur kelembagaan perbankan syariah memegang kedudukan mutlak peranan teramat sangat vital sentral penentu urat nadi tingkat keberhasilan efektivitas pencapaian kinerja target operasional bank. Pola keberhasilan integrasi sistem tata kelola ganda institusi dewan petinggi umum dipadukan pengawasan independen Dewan Pengawas Syariah sukses melahirkan kombinasi saringan perisai tameng jaminan efisiensi alur biaya birokrasi dan jaminan kehalalan produk secara berkesinambungan. Kedepannya, perbankan

syariah mutlak selalu menyempurnakan struktur kelincahan organisasinya mengantisipasi disrupsi digital masa depan.

Daftar Pustaka

Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Gema Insani Press.

Arifin, Z. (2009). *Dasar-dasar manajemen bank syariah*. Azkia Publisher.

Chapra, M. U., & Ahmed, H. (2002). *Corporate governance in Islamic financial institutions*. Islamic Research and Training Institute (IRTI).

Djamil, F. (2012). *Penyelesaian pembiayaan bermasalah di bank syariah*. Sinar Grafika.

Firdaus, M. H., & Rahmati, A. (2018). Analisis pengaruh good corporate governance terhadap kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam, 6*(1), 23–40.

Ginena, K., & Hamid, A. (2015). *Foundations of Shari'ah governance of Islamic banks*. John Wiley & Sons.

Hasan, Z. (2009). Corporate governance: Western and Islamic perspectives. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 2*(1), 144–161.

Ikatan Akuntan Indonesia. (2024). *Standar akuntansi keuangan syariah (SAK Syariah)*. Dewan Standar Akuntansi Syariah.

Karim, A. A. (2010). *Bank Islam: Analisis fiqih dan keuangan*. Rajawali Pers.

Muhamad. (2014). *Manajemen dana bank syariah*. Rajawali Pers.

Otoritas Jasa Keuangan. (2014). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03/2014 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah*. OJK RI.

Raharjo, E. (2016). Struktur tata kelola organisasi pada perbankan syariah: Peran Dewan Pengawas Syariah. *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis, 13*(2), 150–168.

Rivai, V., & Arifin, A. (2010). *Islamic banking: Sebuah teori, konsep, dan aplikasi*. Bumi Aksara.

Safiullah, M. (2021). Corporate governance in Islamic banks: A comprehensive review of literature. *Journal of Islamic Accounting and Business Research, 12*(3), 395–420.

Wibowo, M. G. (2022). Efektivitas operasional dan efisiensi perbankan syariah dalam menghadapi era digitalisasi. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, 9*(4), 512–525.